

Gubernur Anwar Hafid dan KLH Satukan Langkah Tertibkan Tambang Ilegal

SULTENG RAYA - Gubernur Sulteng, Anwar Hafid melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dihadapan Menteri KLH, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Anwar Hafid memaparkan polemik tambang-tambang ilegal yang berperan aktif dalam merusak lingkungan, utamanya yang berada di kawasan Poboya, Kota Palu hingga tambang batuan di Kabupaten Donggala.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid memaparkan berbagai persoalan tambang bermasalah yang hingga kini masih terjadi, khususnya tambang ilegal yang beroperasi tanpa prosedur dan pengawasan memadai.

Ia menyoroti kondisi tambang di kawasan Poboya, Kota Palu, serta tambang batuan atau galian C di wilayah antara Kota Palu hingga Kabupaten Donggala. “Di Palu itu ada di Poboya, tambang ilegal san-



GUBERNUR SULTENG, Anwar Hafid melakukan audiensi dengan kementerian Lingkungan Hidup RI, Selasa (13/1/2026). FOTO: IST

gat banyak dan berbahaya karena pengolahan di luar prosedur hingga memakan korban jiwa. Di antara Palu sampai Donggala itu juga banyak tambang galian C yang beberapa izinnya juga sudah kami cabut,” ungkap Anwar Hafid, Selasa (13/1/2026).

Menurut mantan Bupati Morowali ini, praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran, hingga ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, penting bagi Gubernur Anwar Hafid untuk berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.

Sebagai informasi, hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjo sejumlah tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungan dihentikan izinnya. Bahkan tambang nikel yang menyebabkan banjir di Morowali Utara izinnya dihentikan sementara hingga perusahaan tambang benar-benar melaksanakan tugasnya membenahi kerusakan di lingkungan pemukiman masyarakat.

Untuk itu, Gubernur Anwar Hafid meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk menguatkan langkahnya dalam menindak praktik pertambangan yang menyalahi aturan.

Baca **GUBERNUR** Hal. 7

Prabowo Targetkan Renovasi 60 Ribu Sekolah Tahun Ini



PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). FOTO: ANTARA/YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

SULTENG RAYA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia melalui program renovasi sekolah secara masif.

“Tahun ini saja, saya akan renovasi 60 ribu sekolah dan seterusnya,” ujar Presiden Prabowo dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang yang diikuti secara daring melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.

Kepala Negara menyampaikan saat ini Indonesia memiliki sekitar 300 ribu sekolah.

Pemerintah menargetkan seluruh sekolah tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Baca **PRABOWO** Hal. 7

Herdman Buka Peluang Rekrut Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia



JOHN HERDMAN bersama ketua PSSI Erick Thohir. FOTO: CNN INDONESIA/ADI IBRAHIM

SULTENG RAYA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru.

Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Herdman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa.

Herdman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps.

“Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka [pemain-pemain Timnas Indonesia], mendengarkan mereka secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung,” kata Herdman.

Baca **HERDMAN** Hal. 7

Sebanyak 26 Desa Terdampak Banjir Bandang dan Longsor di Donggala

SULTENG RAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah mencatat 26 desa di enam kecamatan di Kabupaten Donggala terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sulteng Asbudianto mengatakan enam kecamatan terdampak yakni Tanantovea, Labuan, Sindue, Banawa, Banawa Tengah, dan Rio Pakava.

“Total rumah rusak 28 unit,” katanya saat ditemui awak media di Kota Palu, Selasa.

Ia mengatakan jumlah warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor sebanyak 205 kepala keluarga (KK) dengan 625 jiwa.

“Terdapat juga kerusakan fasilitas umum di wilayah bencana seperti dua jembatan gantung putus, satu jembatan penghubung desa terputus, dan satu abutmen jembatan rusak,” ucapnya.

Baca **26 DESA** Hal. 7



ALAT BERAT melakukan normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (13/1/2026). FOTO: ANTARA/BPBD SULTENG

Laporan Evaluasi APBD 2026, Wabup Abdul Sahid Apresiasi Kinerja Banggar DPRD Parigi Moutong



WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG, Abdul Sahid menyampaikan sambutan pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Raperda APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Senin (12/1/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA - Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna digelar di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Senin (12/1/2026).

Mewakili Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Parigi Moutong atas dedikasi dan kinerja dalam mengemban amanah rakyat, khususnya

dalam pembahasan dan pengawasan kebijakan anggaran daerah.

Ia menegaskan, hubungan harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang terbangun melalui sinergi, kerja sama, dan koordinasi sebagai mitra sejajar, merupakan modal penting dalam menjawab berbagai

Baca **LAPORAN** Hal. 7

Bulan K3 Nasional, IMIP Bangun Ekosistem Kerja Melalui Tiga Pilar

SULTENG RAYA – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menggelar peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama seluruh tenant dan mitra kerja lainnya.

Tak sekadar sebagai seremoni tahunan setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari, momentum tersebut sekaligus menjadi refleksi dan evaluasi yang relevan di kawasan industri dengan tingginya intensitas aktivitas produksi.

Disadari, penerapan K3 bukan hanya sebagai sebuah pemenuhan kewajiban hukum, tetapi menjadi regulasi perlindungan.



PERINGATAN bulan K3 di IMIP. FOTO: DOK. IMIP

Saat memimpin langsung upacara peringatan tersebut, Direktur Operasional PT IMIP, Irsan Widjaja, mengajak seluruh manajemen, karyawan, tenant, kontraktor dan pihak lain yang terlibat untuk terus memperkuat komitmen penerapan K3 sebagai nilai inti operasional.

Semua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, menghilangkan toleransi terhadap tindakan dan kondisi tidak aman, serta mempertahankan kolaborasi dalam pengelolaan K3 kawasan.

Baca **IMIP** Hal. 7

Kapolsek Sausu Pastikan Dukungan Penuh untuk Gizi Anak

SULTENG RAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) resmi diluncurkan, bertempat di Dusun III Desa Sausu Torono, Selasa (13/1/2026). Hal itu sebagai komitmen menghadirkan generasi sehat dan berkualitas di wilayah tersebut.

Kapolsek Sausu Polres Parmout, Iptu Yakobus Mangopo, mengatakan, kehadiran aparat kepolisian menjadi simbol dukungan terhadap program nasional yang berorientasi pada pemenuhan gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Menurutnya, program MBG SPPG Torono diharapkan menjadi solusi nyata dalam menekan angka kekurangan gizi, khususnya bagi anak usia sekolah. Dengan dapur pelayanan yang terpusat di Desa Sausu Torono, distribusi makanan bergizi diharapkan berjalan tepat sasaran, higienis, dan berkelanjutan.

Kapolsek menegaskan bahwa Polri siap mendukung penuh program-program sosial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat strategis karena menyangkut masa depan generasi muda. Kami dari Polsek Sausu siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar berjalan aman, tertib, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Yakobus.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelancaran program MBG serta memastikan dapur pelayanan dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab.

Launching dapur MBG SPPG Torono ini menandai langkah awal penguatan pemenuhan gizi masyarakat di Kecamatan Sausu. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi lahirnya generasi Parmout yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. **AMR**



SUASANA launching dapur SPPG di Desa Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parmout, Selasa (13/1/2026). FOTO: HUMAS POLSEK SAUSU

Pemilik Penyewaan Alat Outdoor Ditemukan Meninggal Dunia

SULTENG RAYA - Seorang guru sekolah dasar (SD) ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha penyewaan peralatan kemping atau kegiatan outdoor, di Jalan Kancil, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Senin (12/1/2026) sekira pukul 08.00 Wita.

Korban diketahui berinisial Y (28), seorang guru P3K di SD Inpres Kotarindau berasal dari Kabupaten Tolitoli. Selain berprofesi sebagai tenaga pendidik, korban juga menjalankan usaha penyewaan peralatan kemping.

Kapolsek Palu Selatan AKP Muhammad Kasim, S.H. menjelaskan, peristiwa tersebut pertama kali dike-

tahui oleh saksi berinisial KI yang merupakan karyawan korban, saat itu saksi mendapati rumah dalam kondisi terkunci dari dalam saat tiba di lokasi kerja. Setelah masuk ke dalam rumah, saksi menemukan korban terbaring di atas kasur ruang depan dalam keadaan tidak bernyawa.

“Saksi sempat mencoba membangunkan korban, namun korban sudah tidak bergerak dan tubuhnya terasa dingin,” jelasnya.

Kemudian, saksi menghubungi warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Tidak lama berselang, Personel Polsek Palu Selatan bersama piket fungsi yang dipimpin KSPKT Aiptu Frans Pasinggi segera men-

amankan lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Unit Identifikasi Polresta Palu kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara.

Sekira pukul 10.30 Wita, jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans ke RS Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan medis lebih lanjut.

“Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat sakit, kemungkinan serangan jantung, mengingat korban sebelumnya mengeluhkan kelelahan dan kondisi badan kurang sehat,” jelas Kapolsek. **AMR**



PERSONEL Polsek Palu Selatan, saat melakukan olah TKP, temuan jenazah seorang guru SD di Jalan Kancil, Kelurahan Tatura Selatan, Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA PALU



WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta, saat menerima kunjungan dari Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge, Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS POLDA SULTENG

ALIANSI MASYARAKAT DESA LOLI OGE

Minta Kasus Pembongkaran Bak Air Diselesaikan Kekeluargaan

SULTENG RAYA - Kasus dugaan pembongkaran bak air yang menyeret 12 warga Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, ke ranah hukum mendapat perhatian serius aparat kepolisian. Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge bersama kuasa hukum dari LBH Rakyat Sulteng melakukan silaturahmi dan dialog langsung dengan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Wakapolda Sulteng), Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan menyusul laporan pihak perusahaan tambang galian C ke Polda Sulteng terhadap 12 warga yang dituduh terlibat pembongkaran bak air. Aliansi masyarakat menilai persoalan tersebut merupakan buntut dari konflik lahan dan aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan warga.

Ketua Tim Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge dari LBH Rakyat Sulteng, Firmansyah C. Rasyid, S.H., didampingi advokat rakyat Agussalim, S.H. dan Mei Prawesty, S.H., mengatakan dialog

berlangsung dalam suasana humanis dan terbuka.

“Alhamdulillah, Pak Wakapolda Sulteng merespon baik persoalan pembongkaran bak air ini dan mendorong agar segera diselesaikan tanpa konflik warga yang berkepanjangan,” ujar Firmansyah.

Dalam pertemuan itu, Wakapolda Sulteng meminta Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulteng untuk mempertemukan kedua belah pihak agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pasalnya, warga yang berkonflik di Desa Loli Oge masih memiliki hubungan kekerabatan.

Tak hanya itu, Helmi juga meminta masyarakat Desa Loli Oge untuk melaporkan secara langsung apabila terdapat hak kepemilikan tanah yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan tambang.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan warga Desa Loli Oge secara tegas menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan batuan mineral yang dinilai merampas ruang hidup dan melanggar hak-hak tanah masyarakat. Warga mene-

gaskan tidak pernah memberikan persetujuan atas kegiatan tambang di wilayah mereka.

Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge juga menolak rencana masuknya tujuh perusahaan tambang di wilayah desa mereka, yakni, PT Tiga Berkah (34,7 Ha), PT Asiah Amanah Mandiri (10,47 Ha), PT Central Multi Mineral (34,7 Ha), PT Berkah Batuan Intan Loli (26,74 Ha), PT Wadi Al Aini Membangun (19,12 Ha), PT Loli Pratama Maju (7,53 Ha) dan PT Maher Berkah Mandiri (17,22 Ha).

Selain menolak tambang batuan mineral baru, aliansi masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum makelar tambang. Warga menuntut pengusutan kasus penjualan lahan tanpa sepengetahuan pemilik sah, serta dugaan manipulasi data warga untuk penerbitan SKPT dalam proses sertifikasi tanah.

Aliansi juga menuntut transparansi dana bagi hasil serta penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dinilai tidak jelas dan tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat. **AMR**



SEJUMLAH karyawan PT CPM, saat menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana di beberapa desa di Kabupaten Donggala, Selasa (13/1/2026). FOTO: DOK.PT CPM

PT CPM Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana di Donggala

SULTENG RAYA - PT Citra Palu Minerals (CPM) menyalurkan bantuan logistik, peralatan darurat, dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (13/1/0/2026).

Supervisor PPM/CSR PT CPM Zulkifli Salingkat mengatakan bantuan tersebut telah disalurkan dengan fokus di Desa Wani, Desa Labuan Kungguma khususnya di Dusun Sisere, Desa Labuan Toposo, yang menjadi wilayah terdampak paling parah.

“Untuk Desa Wani dan Desa Labuan Kungguma, bantuan diserahkan di Kantor Camat Tanantovea sebagai posko induk dan diterima langsung oleh Camat Tanantovea, Ketua DPRD Donggala, serta Kepala Pelaksana Posko BPBD,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan PT CPM terus melakukan pembaruan data pasca-bencana serta pendataan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.

Sementara itu, bantuan untuk Dusun Sisere diserahkan langsung kepada keluarga terdampak yang disaksikan langsung Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Budi, Kepala Desa, serta Kepala Dusun Sisere.

“Kami memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima langsung oleh warga yang terdampak,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto mengatakan masih terdapat beberapa titik longsor di Desa Labuan Toposo yang belum dapat dibuka sehingga diperlukan pengerahan alat berat.

“Dengan adanya bantuan dari PT CPM, ini sangat membantu masyara-

kat yang terdampak bencana,” kata Asbudianto.

Kepala Desa Labuan Toposo menambahkan, diri mewakili warga mengapresiasi bantuan yang diberikan PT CPM, karena sangat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir dan longsor. Ia menyebutkan jumlah warga di Dusun Sisere mencapai 198 kepala keluarga atau sekitar 610 jiwa.

“Saat ini masih terdapat lima titik longsor yang belum bisa dibersihkan, ada rumah warga yang tertimbun longsor serta kendaraan yang hanyut,” katanya.

Ia menambahkan kebutuhan paling mendesak bagi warga terdampak meliputi bahan makanan, air bersih, dan pakaian, sembari menunggu proses pembersihan menggunakan alat berat di sejumlah titik longsor. **AMR**

PLN UP3 Palu Pulihkan Jaringan Listrik Akibat Banjir dan Longsor di Tawaeli



BANJIR yang terjadi sebagai dampak hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrem yang melanda sehingga merobohkan rumah dan infrastruktur listrik di area Tawaeli, Donggala. FOTO: PLN UP3 PALU

SULTENG RAYA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu bergerak cepat melakukan recovery jaringan listrik di sekitar kawasan Gardu Induk (GI) Tawaeli akibat bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi sebagai dampak hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Peristiwa ini mengakibatkan gangguan pasokan listrik yang berdampak pada sekitar 21.826 pelanggan dengan total energi listrik yang hilang diperkirakan mencapai sekitar 20 MW. Adapun wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Tawaeli. Secara teknis, banjir dan tanah longsor tersebut menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kelistrikan, antara lain 230 unit trafo distribusi dan 6 penyulang yang mengalami gangguan. PLN UP3 Palu segera mengerahkan personel, peralatan, serta material pendukung untuk

melakukan penanganan secara bertahap sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi lapangan. Manajer PLN UP3 Palu, Ansar, menyampaikan bahwa PLN berkomitmen untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan yang terdampak. "Kami langsung melakukan langkah-langkah penanganan darurat dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat proses recovery jaringan, khususnya di wilayah sekitar Gardu Induk Tawaeli dan daerah-daerah terdampak lainnya," ujar Ansar.

Ansar juga memberikan

apresiasi kepada seluruh petugas PLN yang tetap bekerja maksimal di tengah kondisi cuaca ekstrem dengan tetap mengedepankan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). "Dalam kondisi lapangan yang cukup berat akibat banjir dan longsor, kami menekankan agar seluruh pekerjaan dilakukan sesuai prosedur K3. Keselamatan petugas adalah prioritas utama, dan saya mengapresiasi dedikasi tim di lapangan yang tetap disiplin menerapkan K3 sambil berupaya memulihkan listrik secepat mungkin," tambahnya. PLN UP3 Palu memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan pasokan listrik tersebut. PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan pascabanjir dan longsor, serta segera melaporkan gangguan atau kondisi berbahaya melalui aplikasi PLN Mobile atau kanal layanan resmi PLN lainnya."/>



Ketua DPRD Morowali Tegaskan Kasus Pembakaran di Kantor RCP Murni Tindak Pidana

SULTENG RAYA - Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marsuki, turut memberikan pernyataan setelah berkoordinasi dengan Polres Morowali terkait penangkapan terhadap tersangka R yang saat ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial dan tidak ada kaitannya dengan profesinya sebagai jurnalis. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kriminal murni. "Setelah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini murni perkara pidana pembakaran yang terjadi di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang berkembang di media," ujarnya. Ia juga menyatakan kepercayaan penuh kepada Polri, khususnya Polres Morowali, untuk menangani perkara tersebut secara transparan dan tetap mengedepankan prinsip humanis. Sementara, Polres Morowali menegaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka R yang saat ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial tidak ada kaitannya dengan profesinya sebagai jurnalis, melainkan murni penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pembakaran yang terjadi di Desa Torete,



KETUA DPRD Morowali (kiri), Kapolres Morowali (kanan). FOTO: IST

Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali pada Sabtu (3/1/2026) lalu. Kapolres Morowali, AKBP. Zulkarnain menjelaskan bahwa proses penangkapan dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari hasil penyelidikan, penyidik telah mengumpulkan lebih dari dua alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana tersebut. "Penanganan kasus ini sama sekali tidak berkaitan dengan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis. Ini murni penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana pembakaran di kantor RCP di Desa Torete,"

jelas Kapolres Morowali, Rabu (7/1/2026). Ia memaparkan, alat bukti yang dikantongi penyidik antara lain keterangan saksi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukannya sisa bom molotov, serta rekaman video yang memperlihatkan perbuatan pelemparan api. Kapolres juga meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada kepolisian dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. "Kami menjamin proses penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi

oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegasnya. Sementara, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi dan menghormati profesi jurnalis sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. "Polri menegaskan bahwa kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis. Penanganan dilakukan murni berdasarkan dugaan tindak pidana yang terjadi berdasarkan dari laporan perkembangan Polres Morowali," tegas Brigjen Trunoyudo. Sebagai bentuk komitmen Polri, Karo Penmas menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan berkomunikasi kepada Totok Suryanto selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers bahwa perkara tersebut bukan perkara yang berkaitan dengan profesi jurnalistik, serta meminta Kapolres Morowali untuk membuat surat pemberitahuan kepada Dewan Pers. "Langkah ini kami lakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman di ruang publik dan untuk menegaskan bahwa Polri sangat menghormati kebebasan pers serta profesi jurnalis," jelasnya. /yat

PASTIKAN KONDISI FISIK PRIMA

LPKA Palu Beri Layanan Kesehatan Bagi Anak Binaan

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, terus berkomitmen memberikan pemenuhan hak dasar bagi seluruh anak binaan, salah satunya melalui layanan kesehatan pada Selasa (13/1/2026).

Sebanyak delapan orang anak binaan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin yang bertempat di ruang klinik LPKA Palu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau kondisi fisik para anak binaan agar tetap sehat dan bugar dalam mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan yang telah dijadwalkan. Dalam pelaksanaan layanan kesehatan itu, dua petugas kesehatan LPKA Palu, Lise Aprids Apole dan I Wayan Widnyani, terjun langsung melakukan pemeriksaan. Prosedur yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah (tensi), pemeriksaan keluhan fisik ringan, pemberian vitamin dan obat-obatan sesuai kebutuhan medis anak binaan dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan kamar hunian. Menurut Lise, kegiatan ini merupakan deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin timbul akibat perubahan cuaca atau pola



PETUGAS kesehatan LPKA Palu, Lise Aprids Apole, saat memeriksa tekanan darah salah seorang anak binaan pada Selasa (13/1/2026) di ruang klinik LPKA Palu. FOTO: HUMAS LPKA PALU

aktivitas. "Kami memastikan setiap anak mendapatkan penanganan yang tepat. Jika ada yang merasa kurang sehat, kami segera tindak lanjuti agar tidak mengganggu aktivitas belajar mereka," ujarnya. Kepala LPKA Palu, Weli, menegaskan bahwa layanan kesehatan adalah prioritas utama dalam proses pemasyarakatan anak. Menurutnya, kondisi kesehatan yang stabil merupakan kunci keberhasilan

transformasi perilaku anak binaan. "Layanan pemeriksaan ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menjamin hak dasar para anak binaan. Hal ini sangat sejalan dengan salah satu dari 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu optimalisasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan dan anak binaan," ujar Weli. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antara petugas medis dan petu-

gas pengamanan terus diperkuat untuk memantau perkembangan kesehatan anak binaan secara berkala selama 24 jam. Dengan adanya layanan kesehatan yang konsisten, diharapkan para anak binaan dapat menjalani masa integrasi mereka dengan semangat positif. LPKA Palu berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik demi mencetak generasi muda yang sehat secara fisik dan mental. /yat

Kapolres Banggai Cek Tahanan Pastikan Diperlakukan Baik

SULTENG RAYA - Kapolres Banggai, AKBP Wayan Wayracana Aryawan, melakukan pengecekan terhadap kondisi tahanan yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Polres setempat, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kelayakan fasilitas yang ada di Rutan Polres Banggai. Dalam kunjungannya, Kapolres didampingi oleh Wakapolres, Kasi Propam dan anggota jaga tahanan mengecek satu per satu kondisi ruang tahanan. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahanan mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk dalam hal kesehatan dan kebersihan," ujar AKBP Wayan. Kapolres juga berinteraksi langsung dengan para tahanan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi. "Kesehatan dan kesejahteraan



KAPOLRES Banggai saat berinteraksi langsung dengan para tahanan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi, Senin (12/1/2026). FOTO: DOK POLRES BANGGAI

para tahanan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kami terus pantau dan memperbaiki fasilitas Rutan apabila ada yang rusak," tambahnya. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh

petugas Rutan untuk selalu menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas. "Selalu waspada, jangan ada perlakuan tidak manusiawi. Pastikan hak-hak tahanan terpenuhi dengan baik," tegasnya. /yat

Belanja Pembangunan Jabar 2025 Rp621 Miliar Belum Dibayar

SULTENG RAYA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum dibayarkan senilai Rp 621 miliar. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah pusat.

Terkait adanya belanja pembangunan yang belum dibayarkan, Dedi menjelaskan hal itu dipicu oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.

"Dari pemerintah pusat, dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Meski demikian, Dedi memastikan kekurangan pembayaran dalam belanja pembangunan tersebut akan diselesaikan pada 2026. Pada Januari 2026, akan ada p e m a s u k a n ke k a s d a e r a h P e m e r i n t a h D a e r a h P r o v i n s i J a w a B a r a t s e b e r t r i l i - u n . D a r i R p 2 t r i l i - t e r s e b u t , a k a n d i g u n a k a n u n t u k b e l a n j a g a j i , t u n j a n g a n p e n g h a s i l a n p e g a w a i , d a n k e b u t u h a n l a i n n y a s e h i n g g a m e n y i s a k a n d a n a s e k i t a r R p 800 m i l i a r d i k a s d a e r a h . D e n g a n d e m i k i a n , d i p a s t i k a n t e r s e d i a d a n a u n t u k m e m b a y a r k a n b e l a n j a p e m b a n g u n a n y a n g b e l u m t e r b a y a r p a d a 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga sisa lebih

penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2025 hanya sebesar Rp 500.000.

Herman mengatakan minimnya silpa tersebut menandakan APBD telah dipergunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Menurut dia, keuangan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Artinya, uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel," ujar Herman.

Kondisi silpa APBD 2025 tersebut, lanjut Herman, lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Herman berharap pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jawa Barat istimewa. Meski



Dedi Mulyadi

terdapat tunggakan belanja pembangunan Jawa Barat pada 2025 sekitar Rp 621 miliar. **RRB**

Bahlil Umumkan *Lifting* Migas Tercapai Pertama Kali dalam 10 Tahun



MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Terminal Integrated Plumpang. FOTO: PERTAMINA

SULTENG RAYA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan capaian penting sektor hulu migas pada 2025. Realisasi *lifting* minyak bumi menembus target APBN untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.

Bahlil menerangkan, rata-rata *lifting* minyak bumi mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN 605 ribu barel per hari. Capaian tersebut, kata dia, mengakhiri tren kegagalan pemenuhan target *lifting* yang berlangsung hampir sepuluh

didorong temuan dan pengembangan lapangan besar seperti Banyu Urip.

"Target *lifting* kita alhamdulillah mencapai target. Bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit," kata Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan pencapaian tersebut menjadi momentum penting di tengah dinamika global dan tekanan sektor energi sepanjang 2025. Kementerian ESDM tetap menjaga produksi migas nasional meski harga minyak dunia bergerak jauh di bawah asumsi APBN. Realisasi *lifting* yang

tercapai penuh belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan negara. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 ditetapkan 82 dolar AS per barel, sedangkan realisasi rata-rata sepanjang tahun hanya berada di kisaran 68 dolar AS per barel. "Lifting kita tercapai, tapi harganya memang lagi turun," ujar Bahlil.

Kondisi tersebut menaah kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Sepanjang 2025, PNBP SDA migas tercatat Rp 105,04 triliun atau sekitar 83,7 persen

dari target APBN Rp 125,46 triliun. Penurunan harga menjadi faktor utama meski volume produksi terjaga.

Di sisi lain, sektor energi secara keseluruhan tetap menopang fiskal negara. PNBP yang dicatat Kementerian ESDM mencapai Rp 138,37 triliun atau 108,56 persen dari target DIPA Rp 127,44 triliun, ditopang lonjakan PNBP minerba di tengah harga komoditas yang tidak sepenuhnya menguntungkan.

Kontribusi sektor ESDM terhadap APBN pun tetap signifikan. Total PNBP

ESDM, gabungan migas dan minerba, mendekati Rp 240 triliun dan menyumbang sekitar 15-16 persen terhadap penerimaan negara, di luar penerimaan pajak lainnya.

Kinerja hulu migas juga diiringi penguatan sektor gas bumi. Sepanjang 2025, Indonesia tidak merealisasikan impor LNG meski sempat direncanakan sekitar 40 kargo di awal tahun. Dari total pemanfaatan gas sekitar 5.600 BBTUD, porsi domestik mencapai 69 persen dan ekspor 31 persen, dengan hilirisasi industri menyerap 37 persen. **RRB**

Kereta Api Subsidi Layani 1,1 Juta Penumpang Selama Nataru

SULTENG RAYA - Kereta api bersubsidi menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Skema Public Service Obligation (PSO) memastikan akses transportasi tetap terjangkau di tengah lonjakan perjalanan akhir tahun.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat layanan kereta PSO melayani 1.103.379 penumpang sepanjang periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, jumlah tersebut mencerminkan peran kebijakan subsidi pemerintah dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. "Sepanjang periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, layanan kereta api PSO melayani 1.103.379 pelanggan, mencerminkan peran strategis kebijakan subsidi pemerintah dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2025).

Dari total tersebut, sebanyak 676.149 penumpang menggunakan Kereta Api Jarak Jauh PSO dan 427.230 penumpang memanfaatkan Kereta Api Lokal PSO, keduanya meningkat dibandingkan Nataru 2024/2025.

Anne mengatakan layanan PSO menjadi instrumen penting negara dalam menjaga

keterjangkauan transportasi publik. "Melalui skema PSO, pemerintah melalui KAI hadir memastikan masyarakat tetap dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan terjangkau, khususnya pada periode dengan mobilitas tinggi seperti Nataru," kata Anne.

KAI menilai layanan ini berperan menjaga konektivitas dan pemerataan akses, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Secara keseluruhan, KAI melayani 4.179.095 penumpang selama Nataru 2025/2026, tumbuh 12,02 persen dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 3.730.584 penumpang. Dari jumlah itu, layanan kereta api jarak jauh melayani 3.392.439 penumpang atau setara 122,9 persen dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk.

Tingkat keterisian tinggi juga terjadi pada kereta api lokal dengan 786.656 penumpang atau 105,6 persen dari kapasitas 745.056 tempat duduk.

Anne menjelaskan, tingkat okupansi di atas kapasitas dipengaruhi pola perjalanan penumpang yang dinamis, khususnya pada layanan lokal dengan banyak titik naik-turun. "Tingginya pergerakan masyarakat selama Nataru turut mendorong aktivitas perjalanan wisata, silaturahmi keluarga, serta perputaran ekonomi di berbagai daerah," kata Anne.

Menurut KAI, layanan kereta bersubsidi turut menopang sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar stasiun.

Dari sisi operasional, kinerja perjalanan kereta api tetap terjaga di tengah lonjakan penumpang. "Selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, On Time Performance kereta api penumpang mencatat ketepatan waktu keberangkatan 99,68 persen, sementara ketepatan waktu kedatangan mencapai 96,13 persen," ujar Anne. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kesiapan operasional KAI dalam menghadapi periode puncak perjalanan.

Pada periode Nataru, KAI juga memberlakukan diskon tarif 30 persen untuk kereta api ekonomi komersial pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dengan total 1.509.080 tempat duduk. Hingga 5 Januari 2026 pukul 08.00 WIB, tiket diskon yang terjual mencapai 1.524.487 tiket atau 102 persen.

Anne mengatakan, kebijakan tarif ini sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong mobilitas produktif selama liburan.

Ke depan, KAI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perkotaan Kementerian Perhubungan, agar layanan PSO berjalan berkelanjutan. **RRB**

Pemkot Tangsel Perpanjang Status Darurat Sampah

SULTENG RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperpanjang status darurat penanggulangan sampah selama 14 hari ke depan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel Essa Nugraha mengatakan, perpanjangan status itu direkomendasi berlangsung selama dua pekan, sejak 6 hingga 19 Januari 2026.

"Pada masa perpanjangan difokuskan pada optimalisasi pembersihan dan pengangkutan sampah serta optimalisasi penegakan perilaku buang sampah," katanya di Tangsel, Kamis (8/1/2026). Ia mengatakan, selama masa darurat penanggulangan sampah tersebut, tim satuan tugas (satgas) akan fokus melakukan pengangkutan sampah yang menumpuk di sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel Tb Asep Nurdin mengatakan, perpanjangan itu didasari hasil evaluasi status darurat sampah tahap pertama yang berakhir pada Senin (5/1/2026).

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memperpanjang status tanggap dar-

urat pengelolaan sampah," ucapnya. Dia menjelaskan perpanjangan itu berdasarkan hasil evaluasi di mana masih ditemukan tumpukan sampah sehingga memerlukan penanganan ekstra.

Dengan adanya perpanjangan status itu, ia berharap, penanganan masalah sampah berjalan lebih optimal. "Perpanjangan ini untuk memastikan pelayanan kebersihan tetap maksimal dan kondisi kota kembali normal sepenuhnya," ujar dia.

DIALIHKAN KE CILEUNGSI

Pemkot Tangsel mulai mengalihkan pembuangan sampah 200 ton ke tempat pembuangan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah itu dilakukan setelah penghentian pengiriman ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, Kota Serang, Banten. "Sebanyak 200 ton sampah per hari akan dikirim ke Cileungsi selama 14 hari ke depan," ujar Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Ia mengatakan, pengalihan pembuangan sementara ke Cileungsi sebagai solusi penangan sampah di daerah itu setelah kebijakan Pemerintah Kota Serang menghentikan sementara pengiriman sam-

pah dari Tangsel ke TPAS Cilowong. "Ke Cileungsi ini diambil untuk memastikan tidak ada tumpukan sampah di titik-titik permukiman maupun ruang publik di Tangsel," ucapnya.

Pemerintah Kota Tangsel berkomitmen terus mencari solusi terhadap permasalahan sampah. Pasalnya pihaknya juga masih terus berupaya menjalani kerja sama pengelolaan tersebut bersama Pemkot Serang.

"Saya sampaikan dengan tegas kepada masyarakat, Pemkot Tangsel tidak berhenti bekerja dan tidak menyerah. Penghentian pengiriman ke Cilowong ini bersifat sementara," katanya. Ia menjelaskan, penanganan persoalan sampah tanggung jawab pemerintah dan tidak akan dibebankan kepada masyarakat. Ia mengemukakan situasi ini sebagai kesempatan Pemkot Tangsel mengevaluasi sistem secara fundamental agar tidak terus bergantung pada kerja sama antar-daerah yang bersifat darurat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Serang menghentikan sementara pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong mulai Selasa sore, guna melakukan evaluasi menyeluruh terkait dam-

pak lingkungan dan sosial. "Penyetopan ini dilakukan sembari menunggu hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada Wali Kota Serang untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya," kata Kepala DLH Kota Serang Farach Richi.

Pihaknya telah mengirimkan surat kepada DLH Kota Tangsel terkait dengan penghentian sementara ini. Evaluasi difokuskan pada kesiapan teknis di TPAS Cilowong serta penerimaan masyarakat sekitar. Langkah ini diambil sebagai respons atas masukan masyarakat terkait dengan dampak pengangkutan sampah.

Sebagai upaya mitigasi, DLH Kota Serang sebenarnya telah memperkuat pengawasan dengan mendirikan pos pemeriksaan di Kilometer 68 dan di daerah Kakung. **RRB**

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 1985 IB
NAMA	: FRANSISCA PURBA
ALAMAT	: JL. PEMUDA ASPOLRES NO. 9 RT/RW 001/001 KEL. BESUSU TENGAH KEC. PALU TIMUR KOTA PALU
MERK/TYPE	: NISSAN ALMERA 1.5 (4X2) MT
NO RANGKA	: MNTBBAN172004778
NO MESIN	: HR15-999562C
NO BPKB	: T0368354251

Unit yang berlangganan rental MOBIL LORENNNA akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK 7x. Keberangkatan Palu-Tallo gratis 1 tiket

LORENNNA
TRAVEL AGENT & EXPEDITION

Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tallo
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA: 0852 3256 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami



Biro Perjalanan Umum
CV MITRATOUNA TRAVEL/BIS
PALU-AMPANA

AGEN PERWAKILAN :

PALU : Jl. Tombolotutu No.50-52
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

AMPANA : Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9 (Dekat Tugu Ampana)
Telp : 081252984112, 081252984116
081243799363, 08122150777

BIRO PERJALANAN UMUM
PRIMA JAYA TRAVEL

PALU - POSO - TENTENA
BUNGKU - KENDARI

PALU Jl. Hangtuha No. 40 Telp.: 082396625339	BUNGKU (MOROWALI) Jl. Trans Sulawesi (Depan RSUD Morowali) Telp.: 085394579024	KENDARI Terminal Puwatu Telp.: 082342677110
---	---	--

PPh 21 Ditanggung Pemerintah 2026, Langkah Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

KEBIJAKAN Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) yang resmi diberlakukan sepanjang 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global dan tantangan pemulihan daya beli domestik.

OLEH : SITI AISYAH)*

MELALUI kebijakan pemerintah menegaskan keberpihakan fiskal kepada pekerja dan dunia usaha, khususnya sektor-sektor padat karya yang memiliki peran signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak konsumsi rumah tangga. Insentif ini bukan semata kebijakan teknis perpajakan, melainkan bagian dari desain besar stimulus ekonomi untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar secara berkelanjutan. PPh 21 DTP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 memberikan pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat, yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika tekanan ekonomi global, fluktuasi harga ko-

moditas, dan ketidakpastian pasar internasional masih membayangi, konsumsi domestik tetap menjadi andalan utama Indonesia. Oleh karena itu, menjaga pendapatan riil pekerja melalui pembebasan pajak menjadi langkah rasional dan strategis. Pembatasan penerima insentif pada lima sektor tertentu, yakni alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata, mencerminkan pendekatan kebijakan yang terukur dan berbasis prioritas. Sektor-sektor ini dikenal sebagai industri padat karya yang sensitif terhadap pelemahan permintaan dan fluktuasi biaya produksi. Dengan memberikan insentif fiskal secara selektif, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi tenaga kerja dari risiko pemutusan hubungan kerja. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan

karakteristik dan kebutuhan sektor ekonomi. Dari sisi pekerja, PPh 21 DTP memberikan ruang fiskal tambahan dalam pendapatan bulanan. Beban pajak yang ditanggung pemerintah berarti peningkatan penghasilan bersih yang langsung dirasakan. Peningkatan pendapatan ini berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga, mulai dari kebutuhan pokok hingga belanja produk manufaktur. Dalam konteks makroekonomi, konsumsi yang terjaga akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi, memperkuat permintaan domestik, dan menstimulasi aktivitas produksi nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Insentif hanya diberikan kepada pekerja yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memenuhi kriteria tertentu, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak menjadi syarat utama, sehingga kebijakan ini sekaligus mendorong kepatuhan dan inklusi perpajakan. Dengan demikian, stimulus fiskal berjalan seiring dengan penguatan basis data dan tata kelola perpajakan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa PPh 21 DTP merupa-

kan bagian dari fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pemerintah. Artinya, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk mengejar penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dan penyangga ekonomi. Dalam situasi tertentu, negara hadir untuk menanggung sebagian beban masyarakat demi menjaga keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari sektor industri. Kementerian Perindustrian memandang pembebasan PPh 21 sebagai kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan daya beli rumah tangga pekerja industri. Peningkatan pendapatan pekerja akan berdampak langsung pada meningkatnya permintaan produk manufaktur yang ditujukan untuk konsumsi domestik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga memperkuat kinerja industri nasional. Lebih jauh, pihak Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya pemanfaatan insentif ini oleh pelaku industri untuk mendorong produktivitas. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dunia usaha dan tenaga kerja diharapkan mampu memanfaatkan ruang fiskal yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produksi, dan daya saing

nasional. Dengan kata lain, PPh 21 DTP bukan sekadar stimulus konsumsi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat fondasi produktivitas jangka menengah dan panjang. Dalam konteks stabilitas ekonomi nasional, kebijakan PPh 21 DTP 2026 mencerminkan sinergi antara kebijakan fiskal dan strategi pembanguan industri. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat, keberlanjutan usaha, dan disiplin fiskal. Ketika pendapatan pekerja terjaga, konsumsi meningkat, produksi terdorong, dan lapangan kerja terlindungi, maka stabilitas ekonomi dapat dipertahankan secara lebih kokoh. Pada akhirnya, PPh 21 Ditanggung Pemerintah 2026 merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan fiskal dapat berperan aktif sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Dengan sasaran yang jelas, durasi yang terukur, dan dukungan lintas sektor, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Jika diimplementasikan secara konsisten dan diawasi dengan baik, PPh 21 DTP berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tahun 2026 dan seterusnya.)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

TAJUK

Hentikan Kriminalisasi Kritik

KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini. Itu terjadi setelah stand up comedian atau pelawak tunggal Pandji Pragiwaksono menyentil dengan kritikan sangat tajam lewat pertunjukan spesialnya bertajuk Mens Rea. Ia menyentil kekuasaan dan mengajak penontonnya menertawakan absurditas politik Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mantan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, tidak luput dari humor menusuk yang lahir dari keresahannya selama ini. Selain menysasar para pejabat, Pandji juga mengkritik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut keyakinan Pandji, kedua organisasi itu seharusnya menolak pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah. Ia membandingkan keputusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan sikap Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang tidak mau ikut-ikutan mengelola tambang. Tawaran izin tambang itu, kata Pandji, sudah seharusnya ditolak karena di baliknya tersimpan politik balas budi. Akan tetapi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selaku organisasi yang seharusnya membina kehidupan umat malah bersedia menerima dan menganggap itu sebagai ‘rezeki anak saleh’. Namun, gara-gara keberaniannya menyampaikan kritik berbalut humor, Pandji dilaporkan ke aparat kepolisian. Rizki, yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah, melaporkan Pandji karena tersinggung dengan tuduhan politik balas budi. Humor, yang semestinya menjadi alat refleksi, kini dipertukarkan dengan ancaman pidana. Pandji dilaporkan dengan rangkaiian pasal-pasal dalam KUHP baru tentang penodaan agama dan penghantuan. Ancaman hukumannya ialah 3 hingga 4 tahun penjara. Kita harus katakan bahwa pelaporan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Prinsip utama dalam demokrasi ialah pengakuan serta penegakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tentu, kebebasan berekspresi bukanlah cek kosong tanpa batas. Namun, penyelesaian atas ketersinggungan moral dalam sebuah karya seni seharusnya dijawab dengan narasi tandingan atau diskusi terbuka, bukan mengadukan ke aparat penegak hukum. Ketersinggungan sang pelapor juga mengundangi tanda tanya besar. Tayangan Mens Rea memang muncul di layanan streaming video Netflix pada 27 Desember 2025. Akan tetapi, pertunjukan itu sebenarnya sudah lama digelar di Indonesia Arena, Jakarta, yakni pada 30 Agustus 2025. Itu berarti kritik dan satire yang dilontarkan Pandji sudah dinikmati publik offline sejak Agustus silam. Tidak ada satu pun pihak yang tersinggung. Bahkan penonton yang menyaksikan langsung pulang bukan dengan amarah, melainkan membawa kesegaran baru. Publik juga mempertanyakan alasan polisi menerima laporan Rizki. Korps Bhayangkara ternyata bersedia menerima laporan tersebut dengan memakai KUHP baru, meski tempus delicti-nya Agustus tahun lalu. Seharusnya penyidik berhati-hati dalam melakukan kajian awal untuk menilai layak-tidaknya sebuah pengundangan sebelum tanda terima laporan polisi tersebut dibuat. Bagaimana mungkin KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dikenakan pada peristiwa yang terjadi pada 2025. Dalam hukum, ada asas legalitas (nulum delictum sine lege). Sebuah aturan hukum tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif). Jika polisi memaksakan KUHP baru untuk ucapan di tahun 2025, ini adalah cacat prosedur yang sangat serius. Publik tentu tidak ingin penegak hukum menjadi alat yang dipakai pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi siapa pun. Harus kita ingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak membenarkan kritik. Selama tawa masih diizinkan terdengar, demokrasi masih bernapas. Jangan biarkan Indonesia jatuh dalam darurat tawa.* Media Indonesia

Bencana sebagai Produk Normalisasi Kerusakan Ekologis

BENCANA banjir dan tanah longsor telah melanda berbagai lokasi dalam beberapa bulan terakhir, di antaranya seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Papua, dan Sumatera. Kajian oleh Bryan (2022) mengenai Kerangka Kerja Ekologi Sosial Tanggung Jawab (Social Ecology of Responsibility Framework) menunjukkan ketidakmungkinan untuk memisahkan kontribusi krisis ekologi dan kerusakan iklim terhadap tindakan individu, negara, dan korporasi, meskipun ketiganya memiliki skala kerusakan ekologis yang berbeda.

OLEH : INTAN AMALIA SINTA DEWI


AGNEW (Bryan, 2022) menyebut pemahaman individu maupun kelompok sangat dibutuhkan karena saling berhubungan secara simbiosis. Misal, meningkatnya pola konsumsi individu menciptakan permintaan pasar yang mendorong korporasi dan negara untuk melakukan kerusakan ekologis yang lebih besar seperti pembukaan lahan. Dampaknya, pendapatan negara meningkat melalui pajak dan royalti ekspor. Dalam hal ini, korporasi mendapatkan keuntungan dalam bentuk insentif pajak perusahaan, regulasi yang berpihak pada eksploitasi yang lebih luas, hingga subsidi bahan bakar yang mempermudah ekstraksi sumber daya. Selain itu, individu juga mendapat manfaat berupa harga barang/jasa yang relatif rendah dan terciptanya lapangan kerja,

meskipun kesempatan lebih banyak terbuka bagi pekerja kasar (blue-collar worker). Ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi politik sangat berperan dalam mendorong praktik ekstraktif. Disisi lain, resiko yang dihadirkan melampaui keuntungan yang diberikan. Kerusakan lingkungan dalam bentuk ekosisda, seperti deforestasi dan praktik ekstraksi ekstrem, termasuk pengeboran lepas pantai di perairan dalam, penghancuran puncak gunung, fracking, dan penambangan pasir minyak tar, memberikan konsekuensi struktural dari relasi simbiosis ini. Masyarakat di sekitar operasi perusahaan sangat rentan mengalami kemiskinan, penurunan kualitas kesehatan, kekerasan, konflik, kerentanan pangan, dan pengungsian massal. Tak hanya berdampak pada manusia, kerusakan lingkun-

gan hidup juga mengancam biodiversitas di sekitarnya. Diperkirakan terdapat satu juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah atas kerusakan alam yang terjadi (Diaz, 2019). Para ilmuwan juga menyebut bahwa sistem iklim global akan berpengaruh pada bencana yang sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan (Zimmerman; Bryan, 2022). Ini sejalan dengan pernyataan mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) yang menyebut pemulihan seluruh wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera diprediksi memakan waktu hingga 20-30 tahun mendatang, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah. Bencana Banjir Sumatera Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah korban meninggal dunia pada bencana banjir di Sumatera mencapai 1.112 orang, korban hilang sebanyak 176 orang, dan sejumlah 498.447 jiwa mengungsi (23/12). Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menyebut alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama bencana. Dalam 20 tahun kedepan, Sumatera bahkan diproyeksikan menjadi wilayah dengan kerentanan perubahan iklim tertinggi di Indonesia. Temuan lain menunjukkan bahwa wilayah yang paling parah terdampak banjir di Sumatera Utara berlokasi di sekitar aktivitas industri

ekstraktif. Artinya, praktik eksploitatif dan pengabaian terhadap lingkungan telah dinormalisasi dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, hingga akhirnya bencana hadir sebagai sesuatu yang tidak dapat terelakkan. Dalam pendekatan filsafat enactivism, pengalaman tidak bisa dipahami secara terpisah dari tubuh dan lingkungan sosial tempat ia berada. Jika kebiasaan mengabaikan lingkungan terjadi, maka hal ini akan berkontribusi pada hadirnya societal unfeeling, yaitu ketidakpekaan kolektif terhadap krisis ekologi (Slaby, 2025). Kebiasaan tersebut tidak hanya mengaburkan kesadaran terhadap dampak ekologis, melainkan juga membangun pola wacana untuk mengalihkan permasalahan kepada hal lain serta mengurangi rasa empati terhadap kelompok masyarakat yang dianggap tidak layak mendapat perhatian kolektif. Misal, wacana pejabat publik tentang situasi mencekam yang hanya terjadi di media sosial, atau tentang ambisi menanam lebih banyak pohon sawit di Papua. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketergantungan ekonomi membuat pemerintah terus memfasilitasi industri ekstraksi tersebut, meskipun mereka menyadari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (White, 2015; Leahy, 2019; dalam Bryan, 2022). Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini mendorong lahirnya perubahan sosial oleh masyarakat yang diawali

dengan kesadaran kelas dan diwujudkan melalui proses negosiasi modal sosial. Menurut Bourdieu, individu akan melakukan proses negosiasi dengan modal-modal yang dimiliki (ekonomi, budaya, sosial, simbolik). Proses negosiasi ini berlangsung dalam suatu arena atau field yang akan berujung pada dua konsekuensi, yaitu adanya perubahan sosial atau tidak adanya perubahan sosial. Dalam hal ini, akademisi, masyarakat, dan komunitas menggunakan modal sosial, budaya, dan simbolik sebagai sarana bagi proses negosiasi dalam arena sosial. Mereka telah melakukan negosiasi melalui kritik terhadap tindakan-tindakan penguasa yang mungkin saja dianggap melalaikan kepentingan masyarakat luas, mulai dari menolak bantuan asing, akses pangan dan kesehatan yang belum merata, serta membangu budaya kompetitif dengan para pemengaruh perihail hasil donasi. Masyarakat juga tengah mendorong adanya transparansi audit korporasi dan melakukan tuntutan pada pihak yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan. Apabila berbagai upaya negosiasi telah dilakukan namun tidak menghasilkan perubahan sosial, maka hal ini menandakan adanya reproduksi stratifikasi sosial dimana masyarakat akan tetap menjadi kelas subordinat yang rentan terhadap ketidakadilan. Penulis: Pemerhati Lingkungan *Jawa Pos

 PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi dari luar tanggung jawab percetakan)	WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI	PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.
		REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam. BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T. DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial



BRI terbitkan SBK. FOTO: DOK.BRI

SULTENG RAYA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara resmi menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) dengan nilai sebesar Rp500 miliar.

Hal ini menunjukkan positioning strategis BRI sebagai market leader pengembangan pasar keuangan Indonesia dan sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas jangka pendek yang berkelanjutan.

Adapun penerbitan ini mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan nasional.

Peluncuran SBK BRI yang digelar di BRILiaN Club pada Senin (12/1/2026) dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu dan Direktur Treasury & International Banking BRI

Farida Thamrin. Sejumlah mitra strategis juga turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, dan PT Syailendra Capital.

SBK BRI memperoleh peringkat IdA+ (highest sort term rating) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau setara dengan AAA untuk surat utang jangka panjang, yang mencerminkan tingkat keandalan dan kemampuan BRI dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Dalam struktur penerbitan ini, BRI selaku penerbit, bekerjasama dengan BRI Danareksa Sekuritas selaku arranger. Penerbitan ini menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK), sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 13 tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.

SBK BRI pun ditawarkan dalam 4 tenor, yaitu tenor 1 bulan dengan tingkat diskonto 4.5%, 3 bulan dengan tingkat diskonto 4.60%, 6 bulan dengan tingkat diskonto 4.85% dan 12 bulan dengan tingkat diskonto 4.95%. Instrumen ini dirancang tidak hanya sebagai alternatif pendanaan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan instrumen pasar uang yang transparan, kredibel dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) BRI menjadi solusi pendanaan jangka pendek yang cepat dan efisien bagi Perseroan, sekaligus menawarkan alternatif investasi dengan imbal hasil kompetitif bagi investor. Dengan struktur yang fleksibel dan tata kelola yang kuat, SBK BRI akan memperkuat pengelolaan likuiditas secara prudent serta mendukung transmisi kebijakan dan pendalaman sistem keuangan nasional.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan penerbitan SBK BRI ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran BRI pada pengembangan instrumen pasar uang nasional. Ke depan, BRI akan terus mendorong inovasi produk, memperluas basis investor, serta memastikan seluruh inisiatif pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujar Hery.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae pun mengapresiasi langkah BRI dalam

menerbitkan SBK sebagai wujud konkret peran perbankan dalam mendorong pendalaman pasar uang. Menurutnya, BRI berperan sebagai pionir dalam penerbitan surat berharga komersial, yang merupakan instrumen jangka pendek strategis untuk meningkatkan likuiditas pasar.

“OJK memandang peluncuran SBK BRI sebagai langkah strategis dalam memperkaya instrumen pasar uang nasional, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan di sektor perbankan, serta memperkuat peran instrumen pasar sebagai mekanisme disiplin pasar,” paparnya.

Di samping itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti turut menyatakan bahwa saat ini pendalaman pasar uang berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global. Kehadiran alternatif instrumen jangka pendek seperti SBK BRI tidak hanya memperkuat struktur pendanaan perbankan, tetapi juga memberikan pilihan investasi yang lebih beragam bagi investor.

“Bank Indonesia mengapresiasi peran BRI yang selama ini konsisten mendukung pengembangan pasar

keuangan nasional. Upaya bersama dalam memperdalam pasar keuangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Destry.

Tercatat sejak tahun 2016 hingga 2025, BRI secara reguler telah melakukan penerbitan surat utang Rupiah dengan rating tertinggi dari Pefindo. Peringkat tertinggi dari Pefindo tersebut mencerminkan profil permodalan yang sangat kuat, kualitas aset yang terjaga, serta kemampuan BRI dalam memenuhi komitmen keuangan. ■■

Harga Emas Diprediksi Tembus Rp 3 Juta Pekan Ini



untuk mendekati wilayah Denmark, khususnya Greenland.

“Ini cukup menarik sehingga membuat harga emas dunia kemungkinan masih akan menguat dalam perdagangan Selasa hingga Sabtu. Kemudian, harga logam mulia juga akan terus mengalami kenaikan,” tuturnya.

Ibrahim menambahkan, kenaikan harga logam mulia juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Ia memprediksi rupiah dapat melemah ke level Rp 16.900 per dolar AS hingga akhir pekan ini.

“Masih ada kemungkinan besar di akhir pekan rupiah mendekati level Rp 16.900-an per dolar AS. Ini yang akan membuat harga logam mulia mengalami kenaikan,” jelasnya.

“Kemudian, persoalan supply dan demand juga berpengaruh. Permintaan cukup tinggi di dalam negeri, sementara pasokan terbatas, sehingga hal ini kembali mendorong harga logam mulia,” tambahnya.

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (13/1/2026), melanjutkan tren lonjakan sejak 10 Januari, dan kini naik Rp21.000 dari semula Rp2.631.000 menjadi Rp2.652.000 per gram. Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut

naik ke angka Rp2.503.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Sementara itu, harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa, juga menunjukkan dua produk buatan Galeri24 dan UBS yang kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 meroket dari awalnya Rp 2.596.000 menjadi Rp 2.661.000 per gram (gr) atau naik Rp 65.000. Sedangkan harga emas UBS naik menjadi Rp 2.716.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp 2.652.000 per gram atau naik Rp 64.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. ■■

Pemerintah Siapkan KUR Pertanian Rp300 Triliun

SULTENG RAYA - Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026 untuk memperkuat pembiayaan sektor pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, KUR menjadi instrumen utama pemerintah memperluas akses modal petani dan pelaku usaha tani.

“Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun ini kita punya plafon Rp300 triliun,” kata Airlangga dalam Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Airlangga menjelaskan, pada 2025 penyaluran KUR pertanian mencapai Rp102 triliun, sementara pemerintah menetapkan plafon lebih tinggi untuk memperkuat dorongan pembiayaan.

Airlangga menegaskan plafon KUR pertanian masih dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sepanjang pembiayaan produktif dan tepat sasaran, pemerintah tidak membatasi sektor penerima KUR.

“Dan sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikan, tidak ada pembatasan untuk perta-

nian dan KUR ini bisa terus untuk dijaga,” ujar Airlangga.

Pemerintah mencatat capaian ketahanan pangan 2025 membaik dengan produksi beras 34,71 juta ton dan jagung sekitar 16 juta ton. Capaian tersebut dinilai menopang stabilitas pasokan pangan nasional.

“Dan tentu kita bersyukur tahun 2025 kita bisa mengatasi terkait kemampuan kita untuk ketahanan pangan termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton,” kata Airlangga.

Pemerintah berkomitmen menjaga realisasi KUR pertanian agar terus tumbuh, sekaligus mempertahankan swasembada beras, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani. Kebijakan pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada 2025 saat panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1). Pengumuman ditandai penumbukan alu ke dalam lesung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan perwakilan petani. ■■



PEMERINTAH siapkan KUR pertanian (ilustrasi). FOTO: ANTARA

GUBERNUR BERANI CUP 2026

Quattrick Ikbal, Isba Binangga Hajar Persito 7-3



KEMELUT di depan gawang Persito yang nyaris menghasilkan gol bagi Isba pada pertandingan perdana Grup F Turnamen Sepakbola Gubernur BERANI Cup 2026 di Lapangan Patriot, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Senin sore (13/1/2026). **FOTO: ASLAN LAEHO**

GUBERNUR dari halaman1

Gayung bersambut, Menteri Hanif Faisol mengaku tergerak menindak tegas tambang merusak lingkungan usai melihat video banjir bandang yang disebabkan oleh tambang di kawasan Morowali Utara.

“Setelah kasus banjir membuat kita berbenah untuk aktivitas pertambangan nikel di Morowali. Kita telah membentuk tim sedang melakukan evaluasi dan pemetaan kepada seluruh areal kerja,” ucap

Hanif Faisol. Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menata sektor pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan, berwawasan lingkungan,

dan mengutamakan keselamatan serta keberlanjutan alam. Karena bagi Sulawesi Tengah, investasi terbaik selalu aktif menjaga lingkungan dan tidak merusak pemukiman rakyat. ^{WAN}

26 DESA dari halaman1

Ia menuturkan fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan berupa bak air dan pipa air bersih di Kecamatan Labuan. “Tanggul sepanjang 20 meter juga rusak, sementara beberapa titik akses jalan Trans Sulawesi dan

jalan desa terputus atau tertutup material banjir dan longsor,” sebutnya. Menurut dia, pemerintah provinsi sudah mengarahkan satu unit alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material.

“Saat ini yang dibutuhkan berupa logistik, perbaikan jembatan, pembersihan pascabencana termasuk normalisasi sungai,” ujar dia. Sementara itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni menyebut sudah

menetapkan status tanggap darurat agar seluruh proses penanganan dan perbaikan bisa segera dilakukan tanpa hambatan. “Status tanggap darurat bencana selama tujuh hari hingga 18 Januari 2026,” kata Vera. ^{ANT}

LAPORAN dari halaman1

tantangan pembangunan daerah ke depan. “Sinergi yang terpelihara dengan baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah, termasuk dalam pembahasan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang seluruhnya bermuara pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Ab-

dul Sahid dalam sambutannya. Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih atas laporan Badan Anggaran DPRD terkait hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Raperda APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah, kata dia, berkomitmen menin-

dakanjuti seluruh ketentuan dan rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diakhir sambutan, Wakil Bupati kembali memberikan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong, atas proses pembahasan hingga pengesahan Raper-

da APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026. “Kami bersama DPRD bertekad memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan melalui pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. ^{AJI}

IMIP dari halaman1

Seperti diketahui, Bulan K3 Nasional tahun 2026 ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”. Menurut Irsan Widjaja, tajuk tersebut sangat relevan dengan karakteristik IMIP sebagai kawasan industri terpadu dengan banyaknya kinerja multi-sektor, padatnya mobilitas, kompleksitas proses dan keragaman kepentingan berbagai pihak yang dapat menyebabkan risiko kerja tinggi, sehingga memerlukan tata kelola yang baik. “Dalam membangun ekosistem K3 di kawasan IMIP harus bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, profesional. Pengelolaan harus dijalankan oleh sumber daya manusia kompeten, terser-

tifikasi, dan berintegritas, khususnya pada area kritikal seperti keselamatan proses, pengendalian bahan kimia berbahaya dan kedaruratan. Kedua, andal. Sistem K3 harus berjalan efektif di lapangan, terintegrasi dengan proses bisnis melalui penerapan SMK3 dan metode manajemen pengendalian risiko terbaru secara konsisten. Dan ketiga, kolaboratif. Pengelolaan K3 di IMIP hanya akan berhasil melalui sinergi antara pengelola kawasan, perusahaan tenant, kontraktor, pekerja, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” tegas Irsan Widjaja, Senin (12/01/2026). Ia mengajak semua pihak untuk menghilangkan toleransi dan tindakan atas kondisi tidak aman di lapan-

gan. Manajer Occupational Health and Safety (OHS) PT IMIP, Johnny Samuel, juga menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja melalui pembacaan kebijakan K3 yang diterapkan di kawasan industri mineral terintegrasi dan berfasilitas lengkap dari hulu hingga hilir tersebut. Dalam upacara yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali, Ahmad, juga sekaligus diluncurkan “IMIP Life Saving Rule” (ILSR) sebagai pedoman standar keselamatan bagi karyawan pada area kerja berpotensi bahaya tinggi. Secara rutin setiap bulan sepanjang tahun 2026, 12 point pokok ILSR akan disosialisasikan pada karyawan dan tenant-tenant dalam

kawasan. “Setiap aturan dibuat untuk melindungi nyawa kita. Tidak ada target yang lebih penting dari keselamatan dan orang di sekeliling. Masuk kawasan sama dengan siap bekerja aman. Semua harus pulang selamat,” tegas Deputy Manager Departemen OHS PT IMIP, Rudi Cahyadi. Sejumlah kegiatan berlangsung dalam rangkaian memeriahkan peringatan Bulan K3 Nasional di kawasan IMIP hingga 12 Februari 2026 mendatang. Mulai dari senam sehat, penampilan simulasi fire and rescue , pemberian doorprize, lomba rangking 1, kompetisi basket dan mini soccer, hingga K3 Go to Campus, K3 Go to School. ^{WAN}

SULTENG RAYA – Laga perdana Grup F Turnamen Sepakbola Gubernur BERANI Cup 2026 langsung menyuguhkanontonan spektakuler.

Isba Binangga tampil beringas dan melumat Persito Torue dengan skor telak 7-3 dalam pertandingan penuh drama dan hujan gol di Lapangan Patriot, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Senin sore (13/1/2026). Sepuluh gol tercipta sepanjang laga, namun satu nama paling mencuri perhatian, Ikbal. Striker tajam Isba itu tampil menggila dengan mencetak empat gol (quattrick) hanya dalam tempo babak pertama, sekaligus menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Persito. Sejak peluit awal dibunyikan, Isba langsung mengambil kendali permainan. Trio Ma’ruf, Edwin, dan Urim mendominasi lini tengah, memaksa Persito lebih banyak bertahan. Tekanan itu berbuah hasil pada menit ke-8. Serangan balik cepat dari sisi kiri yang diawali umpan Ma’ruf diselesaikan dengan dingin oleh Ikbal untuk membuka keunggulan Isba, 1-0. Empat menit berselang,

pola serupa kembali memantikan. Umpan jauh Ma’ruf kembali menemui Ikbal yang lolos dari pengawalan dan sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-12. Isba kian menggila. Kesalahan fatal kiper Persito, Lukman, yang gagal mengamankan bola di kotak penalti dimanfaatkan Wendi untuk mencetak gol ketiga pada menit ke-18. Skor 3-0 membuat Persito kian tertekan. Penderitaan tim asal Torue itu belum berakhir. Ikbal kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak dua gol cepat pada menit ke-30 dan 31. Quattrick Ikbal memastikan Isba menutup babak pertama dengan keunggulan telak 5-0. Memasuki babak kedua, Persito mencoba bangkit. Umpan-umpan pendek mulai diperagakan untuk menekan pertahanan Isba. Usaha itu membuahkan hasil lewat gol Moh. Rifai Moro pada menit ke-45

yang memperkecil skor menjadi 5-1. Momentum sempat berpihak pada Persito setelah Alwin kembali menjebol gawang Isba yang dikawal Usman pada menit ke-50. Skor berubah 5-2 dan laga kembali terbuka. Namun Isba tak tinggal diam. Lewat skema serangan dari lini tengah, Fahrul mencetak gol keenam pada menit ke-55, memulihkan jarak keunggulan menjadi 6-2. Persito kembali merespons cepat. Moh. Rifai Moro mencetak gol keduanya (brace) pada menit ke-57, membuat skor berubah 6-3. Pesta gol Isba ditutup oleh pemain pengganti, Rangga, pada menit ke-69. Tendangan bebas Ma’ruf dari sisi kanan tak mampu diantisipasi sempurna oleh kiper Lukman, sekaligus memastikan kemenangan meyakinkan Isba Binangga dengan skor akhir 7-3. Kemenangan telak ini menjadi sinyal kuat Isba Binangga sebagai salah satu kandidat serius di Grup F Gubernur BERANI Cup 2026. Sementara Persito Torue harus segera berbenah jika tak ingin kembali menjadi korban berikutnya. ^{AJI}

PRABOWO dari halaman1

“Kita punya 300 ribu sekolah, saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua sekolah-sekolah di Indonesia, dan kualitasnya akan kita tingkatkan di segala bidang,” katanya. Presiden menekankan bahwa pendidikan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sarana mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program renovasi dan peningkatan kualitas sekolah ini, pemerintah ber-

harap dapat menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh anak bangsa. “Pendidikan adalah instrumen pembangunan, pendidikan adalah instrumen demokrasi, pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan,” imbuh Presiden. Pemerintah juga menargetkan kehadiran minimal satu sekolah unggulan di setiap provinsi Indonesia, baik SMA Taruna Nusantara maupun SMA Garuda.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul dan kepemimpinan masa depan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan memperluas jaringan SMA Taruna Nusantara dan membentuk sedikitnya 20 sekolah serupa bernama SMA Garuda. Sekolah tersebut dirancang sebagai model pendidikan unggulan untuk menjangkau lebih banyak daerah, sekaligus mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. ^{ANT}

HARDMAN dari halaman1

Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Herdman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level Timnas Indonesia. “Jadi, saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh menca-

ri pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia,” jelas Herdman. Pelatih yang curriculum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria,

optimistis dengan daya saing Timnas Indonesia di ajang kontinental. “Untuk AFC [Piala Asia 2027], kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggedor level kami. Kami harus siap karena tim ini sangat bertalenta,” kata Herdman. ^{CNN}

Untad Jalani Evaluasi Lapangan Tiga Prodi Dokter Spesialis



PEMBUKAAN evaluasi lapangan pembukaan Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Penyakit Dalam, serta Ilmu Bedah tersebut berlangsung pada Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS

SULTENG RAYA - Universitas Tadulako (Untad) bersama Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia menggelar pembukaan evaluasi lapangan terhadap rencana pembukaan Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Penyakit Dalam, serta Ilmu Bedah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan persiapan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis di wilayah Sulawesi Tengah.

Pembukaan evaluasi lapangan tersebut berlangsung pada Senin (12/1/2026) mulai pukul 09.00 WITA, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Untad. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Tadulako, perwakilan Direktorat Kelembagaan Kemendikristisainstek RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mitra rumah sakit, serta tim evaluator yang mengikuti kegiatan secara luring dan daring (hybrid).

Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., dalam sambutannya

menyampaikan bahwa rencana pembukaan tiga program studi spesialis tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan Untad, khususnya dalam penguatan kapasitas akademik dan layanan kesehatan. Ia menegaskan komitmen Untad untuk mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Sakit Untad yang sempat terdampak bencana alam tahun 2018 agar kembali berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan.

Rektor juga menambahkan bahwa pengembangan pendidikan dokter spesialis di Untad akan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan jumlah tenaga dokter spesialis di Sulawesi Tengah. Menurutnya, kehadiran program studi spesialis di Untad akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena calon dokter spesialis tidak lagi harus menempuh pendidikan ke luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Pelaksana Tugas Direktur

RSUD Undata Palu, dr. Syahriar, M.Kes., menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Untad. Ia menyoroti belum meratanya distribusi tenaga dokter spesialis, yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah kabupaten dan wilayah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga medis.

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah daerah, dr. Syahriar berharap pengembangan program studi spesialis ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan di Sulawesi Tengah serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Secara daring, perwakilan Direktorat Kelembagaan Kemendikristisainstek RI, Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, dr., menjelaskan bahwa pembukaan program studi spesialis di Untad sejalan dengan kebijakan nasional percepatan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Kebijakan tersebut difokuskan pada penguatan ketimpangan distribusi tenaga

kesehatan, khususnya di Sulawesi Tengah, melalui pembukaan program studi strategis seperti Ilmu Bedah, Penyakit Dalam, serta Obstetri dan Ginekologi.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, rumah sakit mitra, dan pemerintah daerah dalam menjaga mutu pendidikan dokter spesialis. Selain itu, turut disampaikan sejumlah strategi pendukung, termasuk pemberdayaan residen senior sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Ketua Tim Evaluator, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD., KGEH., MMB., FINASIM., FACP., menjelaskan bahwa evaluasi lapangan yang dilakukan bersifat kolaboratif dan suportif. Evaluasi ini tidak berorientasi pada penilaian semata, melainkan bertujuan mematangkan kesiapan institusi melalui pendampingan, bimbingan, serta penguatan kemitraan dengan universitas pendamping dan rumah sakit jejaring. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan kebijakan, serta komitmen bersama menjadi kunci utama dalam percepatan pembukaan program studi spesialis di Universitas Tadulako. Evaluasi lapangan ini diharapkan dapat memastikan proses transisi menuju kemandirian pendidikan dokter spesialis berjalan optimal, sehingga Untad mampu berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga medis spesialis di Sulawesi Tengah.

Usai rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pemaparan kesiapan institusi oleh pihak Universitas Tadulako kepada tim evaluator. *ENG

Untad Teken Revisi Perjanjian Kinerja dan Matangkan Target 2026



REKTOR Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T. menyaksikan penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja antara Rektor dan seluruh unit kerja, Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS

SULTENG RAYA-Universitas Tadulako (Untad) mengadakan Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja antara Rektor dan seluruh unit kerja, Senin (12/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untad tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas perubahan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi kinerja Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Tadulako. Revisi perjanjian kinerja dilakukan guna menyesuaikan target serta indikator kinerja masing-masing unit kerja dengan kebijakan anggaran terbaru, sekaligus memastikan keselarasan antara kinerja unit dan kinerja universitas secara keseluruhan.

Selain itu, revisi perjanjian kinerja tersebut juga menjadi bagian penting sebagai data pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)

Universitas Tadulako Tahun 2025.

Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T. dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa kinerja tidak boleh dilakukai sebatas pemenuhan administrasi, melainkan harus berdampak nyata.

Ia mengajak seluruh pimpinan unit kerja untuk memberikan perhatian serius terhadap perencanaan kinerja, termasuk pada aspek penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

“Perencanaan kinerja dan penganggaran harus mampu memotivasi peningkatan kinerja unit kerja agar benar-benar memberikan dampak,” ujar Rektor.

Lebih lanjut, Prof. Amar menjelaskan bahwa penandatanganan revisi perjanjian kinerja kali ini juga dipengaruhi oleh adanya perubahan Indeks Kinerja Utama (IKU). Sejumlah usulan perubahan IKU yang diajukan oleh Untad tidak seluruhnya disetujui, sehingga tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah target mahasiswa internasional. Dengan ketentuan minimal satu persen dari total mahasiswa aktif, Untad yang saat ini memiliki sekitar 43.000 mahasiswa aktif dituntut untuk menerima kurang lebih 430 mahasiswa internasional dalam satu tahun.

Menutup sambutannya, Rektor menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Tadulako yang telah resmi memperoleh sertifikat auditor. Menurutnya, profesionalisme dan akuntabilitas pengawasan internal merupakan aspek penting dalam mendukung tata kelola universitas yang baik.

Melalui kegiatan tersebut, Universitas Tadulako berharap seluruh unit kerja dapat meningkatkan komitmen terhadap pencapaian kinerja, memperkuat koordinasi lintas unit, serta lebih siap menghadapi tantangan dan target kinerja pada Tahun Anggaran 2026 secara terukur dan berkelanjutan. *ENG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU



Wujud Dukungan, Unismuh Palu Ikut Teken Berani Cerdas



GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafid, diapit oleh para pimpinan perguruan tinggi sambil memperlihatkan naskah yang telah mereka tandatangi. FOTO: HUMAS

SULTENG RAYA - Rektor Universitas Muhammadiyah Palu bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Berani Cerdas yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi

Tengah, Kamis (8/1/2026), dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretaris

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para asisten dan staf ahli gubernur, serta pimpinan perangkat daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa Program Berani Cerdas merupakan program pertama di Indonesia yang secara berani memberikan beasiswa pendidikan tinggi secara gratis kepada seluruh generasi muda yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Menurut Anwar, belum ada pemerintah provinsi lain

yang mengambil langkah sebarani Sulawesi Tengah dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi masyarakatnya. “Saya kira di Indonesia ini belum ada provinsi yang bisa memberi program sebanyak ini,” ujar Anwar.

Ia menilai, Program Berani Cerdas dapat menjamin pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi Tengah. Program tersebut, kata Anwar, bukan sekadar janji kampanye, melainkan upa-

ya nyata pemerintah daerah dalam memajukan provinsi melalui sektor pendidikan.

“Masa depan Sulawesi Tengah berada di tangan generasi muda. Bukan sumber daya alam yang menentukan, tetapi setinggi apa kualitas sumber daya manusia yang kita miliki,” tegasnya.

Anwar juga mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Sulawesi Tengah masih berada di angka sembilan tahun atau setara lulusan SMP. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita Generasi Emas 2045.

“Oleh karena itu, pemerintah provinsi siap menanggung biaya pendidikan generasi muda melalui Program Berani Cerdas agar

beban orang tua semakin ringan,” katanya.

Ia berharap, dengan adanya program tersebut, masyarakat dapat lebih fokus mendukung pendidikan anak-anaknya, sementara persoalan biaya pendidikan tinggi ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Biarkan biaya pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” tegas Anwar.

Sementara itu, Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM menyampaikan, keikutsertaan Unismuh Palu dalam penandatanganan ini sebagai wujud komitmen institusi dalam mendukung program strategis pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan dan peningkatan kua-

litas sumber daya manusia.

Program Berani Cerdas diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan perguruan tinggi dalam mendorong akses, mutu, serta keberlanjutan pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah.

Dengan harapan agar kerja sama tersebut dapat mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Prof Rajindra. *ENG

